



Dugaan Korupsi Dana Bansos Kalbar Polda Desak BPK Lakukan Audit

PONTIANAK, TRIBUN - Penyidik Polda Kalbar hingga saat ini tergagal menyelidiki dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) atau hibah Pemprov Kalbar 2007/2009 yang dialokasikan ke KONJI Kalbar dan dewan pembina Fakultas Kedokteran Untan. Penyidik hingga saat ini belum mendapatkan audit investigasi dari Bansos untuk menjerat para tersangka. Selasa (1/10), Kapolda Kalbar Brigjen Arie Sulistyono memastikan pihaknya komitmen menyelesaikan kasus ini. Namun, ada kewenangan yang

tidak mereka miliki yakni melakukan audit. "Jadi bukan polisi semata. Polisi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit. Kita sudah layangkan surat, tapi belum ada jawaban," ujar Kapolda saat berkunjung ke *Tribun Pontianak* bersama jajarannya.

Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar menjelaskan, kasus korupsi ini menelan kerugian negara Rp 15 miliar lebih. Dia mengata-

■ **Bersambung ke Hal. 15**

Polda Desak BPK Lakukan Audit

kan, penyidik Polda Kalbar sudah lima kali melayangkan surat ke BPK. Dari lima surat itu, hanya dua yang dijawab dengan pelaksanaan audit, tapi untuk Iswanto dan sudah selesai. "Tapi untuk UJ dan ZL belum, sehingga belum bisa

diproses sebagai tersangka," ujar paparnya.

Mukson menyatakan, kasus ini merupakan pelimpahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Januari 2011.

"Terakhir kita mengirim kembali surat meminta audit

perhitungan kerugian negara atas nama kedua orang tersebut agar perkembangan status atas kasus tersebut jelas. Apabila dinyatakan lengkap, akan dilakukan pemeriksaan," imbuh Mukson.

Penyidik, jelasnya, sudah

Sambungan Hal. 9

beberapa kali berkoordinasi dengan tim auditor BPK. Koordinasi telah dilakukan sejak 22 Agustus 2013. Terakhir, lanjutnya, penyidik Polda Kalbar meminta hasil penghitungan kerugian negara ke BPK, tertanggal 30 September 2013. (qky)